

**ANALISIS PROBLEMATIKA DAN EVALUASI KURIKULUM  
MERDEKA BELAJAR DAN PENERAPANNYA DI SEKOLAH NEGERI  
KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG**



Oleh:

**Ilman Fajr Firdaus**

**NIM 22200012098**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
TESIS  
Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Master of Arts (M.A)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

**YOGYAKARTA**

**2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Ilman Fajr Firdaus, S.Sos  
NIM : 22200012098  
Jenjang : Magister  
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk berdasarkan sumber yang dikutip berdasarkan kode etik sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Ilman Fajr Firdaus, S.Sos.

NIM: 22200012098

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilman Fajr Firdaus, S.Sos  
NIM : 22200012098  
Jenjang : Magister  
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Januari 2025

Saya yang menyatakan.



Ilman Fajr Firdaus, S.Sos

NIM: 22200012098

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-265/Un.02/DPPs/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : Analisis Problematika Dan Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar Dan Penerapannya Di Sekolah Negeri Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILMAN FAJR FIRDAUS, S.Sos  
Nomor Induk Mahasiswa : 22200012098  
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Februari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Ahmad Fauzi, M.S.I  
SIGNED



Valid ID: 67c29bdc007f1f

Pengaji II

Dr. Phil. Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A.  
SIGNED



Valid ID: 67c027d44e974

Pengaji III

Prof. Zulkipli Lessy,  
S.Ag.,S.Pd.,BSW,M.Ag.,MSW,Ph.D.  
SIGNED



Valid ID: 67ba58d166af92



Yogyakarta, 19 Februari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 67a899c9c6712

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **ANALISIS PROBLEMATIKA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DAN PENERAPANNYA DI SEKOLAH NEGERI KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG**

yang ditulis oleh:

Nama : Ilman Fajr Firdaus, S.Sos.  
NIM : 22200012098  
Jenjang : Magister  
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Arts (M.A).

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 24 Desember 2024  
Pembimbing,



Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.  
NIP. 1971207 200901 1 003

## ABSTRAK

Kurikulum merdeka belajar dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada guru dalam memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta membantu siswa mendalami konsep dan memperkuat kompetensi. Kurikulum ini diterapkan sebagai respons terhadap pemulihan pasca-pandemi COVID-19, namun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya penguasaan teknologi oleh guru, dan beban tugas siswa yang berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan, permasalahan, dan upaya yang dilakukan dalam implementasi kurikulum merdeka belajar di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, yang dilakukan di SDN 20 Baraka, SMPN 1 Baraka, dan SMAN 5 Enrekang.

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dengan lima indikator: pola komunikasi, faktor eksternal, tipe kebijakan, mekanisme paksaan, dan partisipasi publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka dimulai dengan penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), pembuatan modul pengajaran, pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler, dan evaluasi. Permasalahan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, kesiapan guru, kurangnya koordinasi, integrasi kearifan lokal, penguasaan teknologi, beban tugas guru yang berat, dan minimnya keterlibatan orang tua. Upaya yang dilakukan meliputi bimbingan teknis, in-house training, dan workshop untuk meningkatkan kompetensi guru. Secara keseluruhan, implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Kecamatan Baraka masih menghadapi hambatan, namun berbagai langkah perbaikan terus dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud RI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengoptimalkan implementasi kurikulum di tingkat lokal maupun nasional.

**Kata Kunci:** Kurikulum Merdeka Belajar, Komunikasi, Kecamatan Baraka

## **MOTTO**

*Migunani Tumraping Liyan*

“Bermanfaat untuk orang lain, sebaik-baik manusia adalah yang paling  
bermanfaat bagi manusia yang lain”



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Bapak dan Ibu Tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Bapak dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. Semoga diberi kesehatan dan panjang umur agar dapat menemani langkah kecilku bersama adik-adikku tercinta Fifi, Fathir, Adiba dan Alea menuju kesuksesan. Untuk semua orang, kerabat dan teman-teman yang terkasih dalam hidup saya, semoga Allah menyayangi kalian semua sebagaimana kalian mengasihi saya. Dan terakhir untuk almamaterku tercinta, Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul ***Analisis Problematika Kurikulum Merdeka Belajar Dan Penerapannya Di Sekolah Negeri Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang***. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang telah membawa petunjuk dan cahaya bagi umat manusia menuju jalan keselamatan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini hingga selesai tidak terlepas dari berbagai bentuk dukungan, bimbingan, bantuan, serta dorongan dari banyak pihak yang telah memberikan kontribusi berharga sepanjang proses penelitian. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, kerendahan hati, dan ketulusan, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ahmad Rafiq, S.Ag, M.A., Ph.D, Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

4. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D., Ketua Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Dr. Subi Nur Isnaini, M.A., Sekretaris Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D., Dosen pembimbing tesis penulis, sekaligus dosen utama kami dalam konsentrasi ini, Terima kasih telah memotivasi dalam setiap kuliahnya dan memberikan kemudahan dalam mengarahkan pembuatan tesis ini hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Konsentrasi Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses pembelajaran di kampus ini.
8. Segenap staf dan karyawan di Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bantuan kepada peneliti dalam mengurus berbagai hal terkait perkuliahan
9. Kepada kedua orangtuaku tercinta, bapak Firdaus, S.Pd dan ibu Erni Lamuka, S.Pd yang telah memberikan berbagai bentuk kasih sayang, dukungan, motivasi, dan bantuan yang diperlukan, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

10. Kepada teman-teman perkuliahan IPKP Angkatan 2022/2023, terima kasih sudah membersamai dalam masa-masa perkuliahan di kampus tercinta. Senang rasanya bisa kenal dan berdiskusi bersama kalian.
11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kerjasama dan dukungan, baik secara materi maupun non-materi.

Semoga segala bentuk bantuan, dukungan, dan doa yang diberikan oleh berbagai pihak kepada peneliti senantiasa diterima dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi peningkatan kualitas penelitian di masa mendatang serta pengayaan ilmu peneliti sendiri. Peneliti juga berharap agar tesis ini dapat memberikan manfaat yang luas, baik bagi peneliti pribadi maupun bagi para pembaca. *Āmīn yā robbal-‘ālamīn.*

Yogyakarta, 12 Januari 2025  
Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



**Ilman Fajr Firdaus**

NIM: 22200012098

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR RINGKASAN .....	xvi
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	18
F. Metode Penelitian .....	30
1. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian .....	31
2. Metode Pengumpulan Data .....	31
3. Analisis Data .....	32
G. Sistematika Pembahasan .....	33
BAB II .....	35
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN .....	35
A. Gambaran Umum Kecamatan Baraka .....	35
B. Gambaran Umum SD Negeri 20 Baraka .....	38
1. Profil SD Negeri 20 Baraka .....	38
2. Tenaga Pendidikan dan Kependidikan .....	39
3. Keadaan Siswa .....	39

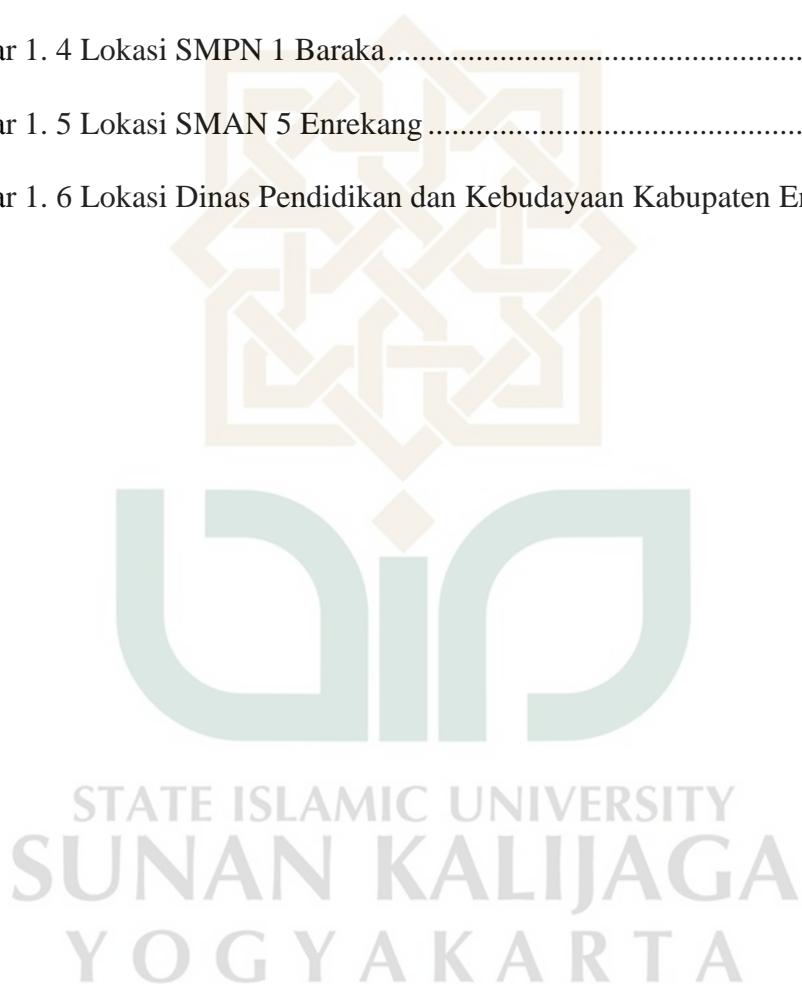
4. Sarana dan Prasarana.....	40
C. Gambaran Umum SMPN 1 Baraka .....	40
1. Profil SMPN 1 Baraka.....	40
2. Tenaga Pendidikan dan Kependidikan .....	42
3. Keadaan Siswa .....	42
4. Sarana dan Prasarana.....	43
D. Gambaran Umum SMAN 5 Enrekang .....	43
1. Profil SMAN 5 Enrekang .....	43
2. Tenaga Pendidikan dan Kependidikan .....	44
3. Keadaan Siswa .....	44
4. Sarana dan Prasarana.....	45
E. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang .....	46
1. Profil Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Enrekang .....	46
2. Visi Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang .....	47
3. Tugas dan Fungsi Perangkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang .....	48
BAB III.....	53
Implementasi Permasalahan dan Upaya Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Negeri Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang .....	53
A. Implementasi Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Negeri Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang .....	53
1. Menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan .....	54
2. Membuat Modul Pengajaran .....	57
3. Pembelajaran Intrakurikuler .....	60
B. Permasalahan dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Negeri Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang .....	64
1. Keterbatasan Sumber Daya .....	65
2. Kesiapan Guru.....	69
3. Kurangnya Dukungan dan Koordinasi .....	71
4. Penyesuaian Kurikulum dengan Kearifan Lokal .....	73
5. Guru kurang menguasai IT.....	76
6. Beban tugas guru terlalu banyak .....	78
7. Kurangnya dampingan dan pengawasan orang tua .....	80
C. Upaya dalam menyelesaikan permasalahan pada penerapan kurikulum merdeka belajar di sekolah-sekolah Kabupaten Enrekang.....	83

1. Bimbingan Teknis (Bimtek).....	83
2. In House Training (IHT) .....	90
3. Workshop .....	95
BAB IV .....	102
ANALISIS TERHADAP PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DI SEKOLAH NEGERI KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG .....	102
A. Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Negeri Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.....	102
1. Pola Komunikasi.....	105
2. Faktor Eksternal .....	110
3. Tipe Kebijakan .....	115
4. Mekanisme Paksaan.....	120
5. Partisipasi Publik.....	125
BAB V .....	131
PENUTUP .....	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran .....	132



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Alur Perumusan dalam Kebijakan Publik.....	21
Gambar 1. 2 Peta Administrasi Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang .....	36
Gambar 1. 3 Lokasi SDN 20 Baraka.....	39
Gambar 1. 4 Lokasi SMPN 1 Baraka.....	41
Gambar 1. 5 Lokasi SMAN 5 Enrekang .....	44
Gambar 1. 6 Lokasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang ...	47



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 - Tabel Jumlah Guru dan Siswa Siswa SDN 20 Baraka .....	40
Tabel 2. 2 - Tabel Jumlah Sarana dan Prasarana SDN 20 Baraka .....	40
Tabel 2. 3 - Tabel Jumlah Guru dan Siswa SMPN 1 Baraka.....	42
Tabel 2. 4 - Tabel Jumlah Sarana dan Prasarana SMPN 1 Baraka .....	43
Tabel 2. 5 - Tabel Jumlah Guru dan Siswa SMAN 5 Enrekang .....	45
Tabel 2.6 - Tabel Jumlah Sarana dan Prasarana SMAN 5 Enrekang .....	45



## **DAFTAR RINGKASAN**

**KEMENDIKBUDRISTEK** = Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

**TP** = Tujuan Pembelajaran

**ATP**= Alur Tujuan Pembelajaran

**SD** = Sekolah Dasar

**SMPN** = Sekolah Menengah Pertama Negeri

**SMAN** = Sekolah Menengah Atas Negeri

**RPP** = Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

**DISDIKBUD** = Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**PNS** = Pegawai Negeri Sipil

**NPSN** = Nomor Pokok Sekolah Nasional

**SK** = Surat Keputusan

**RENSTRA** = Rencana Strategis

**RENJA** = Rencana Kerja

**RKA** = Rencana Kerja Anggaran

**SPP** = Sumbangan Pembinaan Pendidikan

**K13** = Kurikulum 2013

**KMB** = Kurikulum Merdeka Belajar

**KOSP** = Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan

**P5** = Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

**BIMTEK** = Bimbingan Teknis

**IKM** = Implementasi Kurikulum Merdeka

**IHT** = In House Training

**KKG** = Kelompok Kerja Guru

**MGMP** = Musyawarah Guru Mata Pelajaran

**PJOK** = Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

**KKKS** = Kelompok Kerja Kepala Sekolah

**PPPK** = Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan suatu upaya dalam meningkatkan jiwa peserta didik baik secara lahir maupun batin, guna menuju sifat yang lebih baik ke depannya. Di dalam sebuah pendidikan pasti ada kurikulum di dalamnya, karena tanpa adanya kurikulum pendidikan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pembaharuan kurikulum pendidikan merupakan suatu tuntutan yang harus dilakukan demi memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada suatu bangsa. Kurikulum ialah suatu komponen penting dalam sebuah sistem pendidikan formal atau dikenal sebagai sistem persekolahan.<sup>1</sup>

Kurikulum bukan hanya dipandang sebagai dokumen biasa, akan tetapi merupakan sebuah dokumen penting yang menjadikan pendidikan lebih baik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, bagaimana cara mencapai pendidikan tersebut jika para pendidiknya masih belum memahami betul kurikulum yang sedang digunakan sekarang. Oleh karena itu, pendidik harus lebih paham tentang kurikulum yang digunakan sekarang untuk proses belajar mengajar yang baik untuk mencapai tujuan pelajaran yang di inginkan. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 12 Tahun 2024, Kurikulum Mandiri resmi ditetapkan sebagai kerangka dasar dan struktur kurikulum bagi seluruh satuan pendidikan di

---

<sup>1</sup> Anugrah Dwi: Pendidikan Formal dan Contohnya, dalam [https://fkip.umsu.ac.id/ pen-didikan-formal-dan-contohnya/](https://fkip.umsu.ac.id/pen-didikan-formal-dan-contohnya/), diakses tanggal 27 Maret 2024.

Indonesia.<sup>2</sup> Kebijakan mengenai kurikulum dan pembelajaran ini merupakan bagian dari upaya yang lebih komprehensif meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh siswa tanpa memandang latar belakang. Kurikulum Merdeka juga memberikan keyakinan yang lebih besar kepada guru untuk merancang pembelajaran sesuai konteks, kebutuhan siswa dan kondisi satuan pendidikan mengingat kondisi satuan pendidikan dan wilayah di Indonesia sangat beragam. Kurikulum Merdeka juga mengedepankan literasi yang relevan terhadap perkembangan saat ini, termasuk literasi digital, literasi keuangan, literasi kesehatan, dan literasi perubahan iklim.<sup>3</sup>

Kurikulum merdeka belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Di mana konten pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Di sisi lain, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajarnya. Sehingga, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Mulai tahun 2022/2023, satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing. Mulai dari TK B, Kelas I, Kelas IV, VII, dan X. Untuk mengukur kesiapan satuan pendidikan ini, pemerintah juga telah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan Kurikulum

---

<sup>2</sup> Baca Kembali: Regulasi Baru Kurikulum Merdeka, Mendikbud Cabut 18 Peraturan Lama, dalam <https://bacakembali.com/2024/04/08/regulasi-baru-kurikulum-merdeka-mendikbud-cabut-18-peraturan-lama/>, diakses tanggal 24 Juni 2024.

<sup>3</sup> Zakia Rahma Dewi, Sunarni, "Peran Literasi Digital Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka: Adaptasi Dan Transformasi Di Era Digital", *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, vol.4, no.1 Juni 2023, h. 9-14.

Merdeka.<sup>4</sup> Dan juga guru memiliki keleluasaan dalam memilih bahan ajar yang cocok dan tepat untuk peserta didiknya yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat dari peserta didik masing-masing individu.

Konsep kebijakan merdeka belajar ialah guru sebagai tenaga pendidik mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mampu membangkitkan semangat belajar agar siswa tidak merasa terbebani oleh materi yang disampaikan guru. Dalam Kurikulum Merdeka Belajar ini seorang guru dituntut harus kreatif dan inovatif dalam mendesain pembelajaran. Dalam menciptakan pembelajaran yang merdeka bagi peserta didik, seorang guru harus mampu menggunakan daya kreativitasnya dalam mendesain pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang ada.<sup>5</sup>

Proses pembelajaran akan menarik dan menyenangkan apabila seorang guru mampu mendesain pembelajaran secara kreatif dan inovatif. Guru bisa memilih metode pembelajaran yang cocok bagi peserta didik serta menggunakan media pembelajaran agar peserta didik akan lebih mudah mengerti dan memahami materi yang diajarkan. Dengan penggunaan metode dan media pembelajaran yang tepat maka akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton. Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar, pembelajarannya berpusat pada peserta

---

<sup>4</sup> Direktorat Sekolah Dasar: Kurikulum Merdeka, dalam <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/kurikulum-merdeka>, diakses tanggal 27 Maret 2024.

<sup>5</sup> Dahlia Sibagariang, Hotmaulina Sihotang, Erni Murniarti, “Peran Guru Penggerak Dalam Pendidikan Merdeka Belajar di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Pendidikan*, vol.14, no.2 Juli 2021, h. 88-99.

didik yaitu dengan berfokus pada pribadi peserta didik, pengalaman, latar belakang, perspektif, bakat, minat, kapasitas dan kebutuhan mereka pada pembelajaran.<sup>6</sup>

Kemendikbudristek melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus (kurikulum darurat) untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) pada masa pandemi. Hasilnya, dari 31,5 persen sekolah yang menggunakan kurikulum darurat menunjukkan, penggunaan kurikulum darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73 persen (literasi) dan 86 persen (numerasi). Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Untuk mendukung visi pendidikan Indonesia, dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, Kurikulum Merdeka (yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe) dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kurikulum ini juga merupakan langkah terobosan untuk membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam dan menyenangkan. Sehingga, peserta didik pun dapat lebih mudah memahami pembelajaran yang dilakukan.<sup>7</sup>

Ada beberapa problematika yang dihadapi guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar. Didalamnya terdapat rencana pembelajaran yang mengarahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik agar

---

<sup>6</sup> Gerakan Dairi Merdeka Belajar: Implementasi Kurikulum Merdeka dalam <https://merdekabelajar.dairikab.go.id/tentang-kurikulum-merdeka-dan-platform-merdeka-mengajar/>, diakses tanggal 27 Maret 2024.

<sup>7</sup> Desti Relinda Qurniawati, "Efektivitas Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar", *Proceeding Umsurabaya* (2023), h. 195.

mereka memiliki kesiapan pribadi dan kemampuan sesuai merumuskan TP dan menyusun ATP dan Modul Ajar, menentukan metode dan strategi pembelajaran, minimnya kemampuan menggunakan teknologi, terbatasnya buku siswa, kurangnya kemampuan menggunakan metode dan media pembelajaran, materi ajar terlalu luas, menentukan proyek kelas I dan IV untuk tingkat SD, kurangnya alokasi waktu pembelajaran berbasis proyek, dan menentukan bentuk asesmen pada pembelajaran berbasis proyek.

Guru tidak mempunyai pengalaman dengan konsep Kurikulum Merdeka Belajar, keterbatasan referensi sehingga guru kesulitan menemukan rujukan mendesain dan mengimplementasikan merdeka belajar, guru masih menggunakan metode pembelajaran ceramah atau penugasan sehingga pembelajaran cenderung bersifat monoton, guru terkendala dengan bahan ajar dari pusat yang masih terbatas, guru juga mengalami permasalahan di format asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif yang masih dibuat secara manual karena belum ada format dari pusat dan dalam penerapan dan penguatannya.<sup>8</sup>

Berangkat dari beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh sekolah, baik guru maupun siswa dalam menerapkan konsep kurikulum merdeka belajar ini, berbagai upaya terus dilakukan seperti diadakannya pelatihan guru untuk memastikan bahwa guru siap menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan dan dapat memberikan pengajaran yang berkualitas tinggi kepada siswa.<sup>9</sup> Pelatihan ini

---

<sup>8</sup> H. R. Sabriadi, Nurul Wakia. "Problematika implementasi kurikulum merdeka belajar di perguruan tinggi." *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 11, no. 2 (2021), hal. 175.

<sup>9</sup> Putri, Vahira Febri Herina, Masduki Asbari, and Salma Adzka Khuzaima Khanza, "Revolusi Pendidikan: Kurikulum Merdeka Solusi Problematika Belajar?" *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, vol. 2, no. 6 (2023): hal. 8.

bisa dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti pelatihan di tempat kerja (*in service training*), program pra-jabatan (*pre-service training*), lokakarya, kursus daring, dan program magang.

Hal lain yang juga dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi mengenai kurikulum merdeka belajar seperti penyebarluasan informasi, pemahaman, dan panduan tentang kurikulum merdeka kepada seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakat umum memahami konsep, tujuan, dan cara implementasi Kurikulum Merdeka. Kemudian meningkatkan sarana dan prasarana dalam kurikulum merdeka belajar yang merupakan upaya untuk menyediakan, memperbarui, dan mengoptimalkan fasilitas fisik dan infrastruktur yang mendukung proses pembelajaran sesuai dengan prinsip dan tujuan kurikulum merdeka. Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung implementasi kurikulum secara efektif.

Di Kabupaten Enrekang, kurikulum Merdeka Belajar ini juga baru diterapkan di yang mana sebelumnya menerapkan Kurikulum 2013. Kurikulum merdeka menjadi urgen diterapkan sebagai langkah pemulihan pasca covid-19 yang pada akhirnya juga memunculkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sekolah, baik siswa maupun guru seperti: kurangnya sarana dan prasarana, guru kurang menguasai IT, kurangnya interaksi sosial, sulit memberikan gambaran

konkrit kepada siswa, beban tugas siswa terlalu banyak, berkurangnya alokasi waktu jam pelajaran, kurangnya dampingan dan pengawasan orang tua.<sup>10</sup>

Kurikulum Merdeka Belajar sendiri diterapkan pada Tahun Ajaran 2021/2022 dan belum semua sekolah menerapkan kurikulum ini sehingga referensi mengenai Kurikulum Merdeka Belajar ini pun masih sedikit terutama pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Dalam pelaksanaanya saja masih ada guru yang belum bisa keluar dari zona nyamannya, sedangkan dalam pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar ini seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mendesain pembelajarannya yaitu guru harus memiliki kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran dan mengembangkan secara mendalam materi yang menarik dan menyenangkan sehingga guru harus keluar dari zona nyamannya dan mengikuti perkembangan zaman dalam mengajar.

Salah satu sekolah di Kabupaten Enrekang yakni MAN 1 Enrekang, sebelumnya telah mempersiapkan diri dalam proses perubahan kurikulum yang akan diterapkan di sekolah dalam hal ini kurikulum merdeka belajar. Persiapan tersebut diwujudkan dengan dilakukannya sosialisasi antara para pemangku kepentingan dalam konteks pendidikan yang mencakup pemerintah, sekolah, guru, siswa, orang tua guna terjadi kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik, juga sebagai pengawasan dan pemantauan untuk memastikan bahwa

---

<sup>10</sup> Selamat Ariga, “Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Covid”, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 2 Agustus 2023, h. 662-670.

implementasi kurikulum tersebut berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar yang ditetapkan.

Berpijak dari latar belakang di atas, yang menjadi kegelisahan ilmiah adalah dengan munculnya beberapa masalah yang harus dihadapi oleh stakeholder di sekolah dalam penerapan poin-poin yang ada di dalam kurikulum merdeka belajar, lantas apa saja sistem atau strategi yang diterapkan oleh kepala sekolah maupun guru?. Pertanyaan ini penting karena syarat maju dan berkembang lembaga pendidikan harus memiliki daya inovasi, dan dapat berkolaborasi. Jika tidak mampu berinovasi dan berkolaborasi, maka akan tertinggal jauh ke belakang. Lembaga pendidikan harus mampu menyeimbangkan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman. Dalam mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukannya pembaharuan kurikulum sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi. Dikarenakan, apabila tidak dilakukan suatu pembaharuan maka akan membuat proses pembelajaran dan pendidikan di Indonesia akan mengalami keterlambatan dengan pendidikan negara lain. Olehnya itu, penulis akan melakukan penelitian di SD Negeri 20 Baraka, SMPN 1 Baraka, dan SMAN 5 Enrekang yang menjadi sekolah induk di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Dengan melakukan penelitian di tiga jenjang sekolah tersebut, diharapkan mampu memberi jawaban mengenai sistem atau strategi yang dilakukan sekolah dalam merespon masalah-masalah di dalam penerapan kurikulum merdeka belajar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berfokuskan penelitian pada masalah tentang penerapan kurikulum merdeka belajar pada tingkatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan

Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.

Dengan ini, maka rumusan masalah pada penelitian ini mencakup beberapa poin sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Kurikulum Merdeka Belajar pada siswa SD 20 Baraka, SMPN 1 Baraka, SMAN 5 Enrekang di Kecamatan Baraka ?
2. Bagaimana problematika guru dalam penerapan Kurikulum Merdeka Belajar pada siswa SD 20 Baraka, SMPN 1 Baraka, SMAN 5 Enrekang di Kecamatan Baraka ?
3. Bagaimana upaya guru dan sekolah untuk mengatasi problematika terhadap penerapan Kurikulum Merdeka Belajar pada siswa SD 20 Baraka, SMPN 1 Baraka, SMAN 5 Enrekang di Kecamatan Baraka ?

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana output atau hasil dari penerapan Kurikulum Merdeka pada semua level jenjang pendidikan, dalam hal ini yang dimaksud adalah jenjang pendidikan tingkat SD 20 Baraka, SMPN 1 Baraka, SMAN 5 Enrekang di Kecamatan Baraka.
2. Selain menekankan pada hasil penerapan Kurikulum Merdeka pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, penelitian ini juga mengeksplorasi lebih jauh dampak penerapan Kurikulum terhadap kinerja para tenaga pendidik (Guru).
3. Setelah mengetahui hasil penerapan dan dampaknya terhadap kinerja tenaga pendidik, tujuan selanjutnya adalah untuk menawarkan solusi melalui pemecahan masalah terkait problematika penerapan Kurikulum Merdeka yang difokuskan di Kecamatan Baraka.

## D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pada tinjauan terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian penulis, yaitu artikel yang mengkaji tentang penerapan kurikulum merdeka belajar di sekolah-sekolah Indonesia dengan menggunakan analisis fokus yang berbeda-beda. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual terkait penerapan kurikulum merdeka belajar berdasarkan literatur yang relevan.

Beberapa penelitian memberikan perspektif penting mengenai penerapan kurikulum merdeka belajar ini. Penelitian dari Restu Rahayu et al., menunjukkan bahwa implementasi kurikulum di sekolah penggerak telah dilaksanakan dengan optimal dan sedang berlangsung, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan hambatan. Kunci keberhasilan dari adanya penerapan kurikulum di sekolah penggerak adalah dari kepala sekolah dan guru-gurunya harus memiliki kemauan untuk melakukan Perubahan. Kepala sekolah selaku pemimpin harus dapat merubah mindset Sumber Daya Manusia yang ada di sekolah tersebut untuk mau melakukan Perubahan sehingga kurikulum merdeka dapat diterapkan.<sup>11</sup> Persiapan implementasi Kurikulum Merdeka, guru perlu mempelajari lebih jauh mengenai Kurikulum Merdeka, mempertimbangkan projek sesuai Fase siswa agar tercapai capaian pembelajaran yang bermakna, mendalam, dan menyenangkan serta pelajar Pancasila yang berkompeten.<sup>12</sup> Terdapat 6 peran guru penggerak dalam

---

<sup>11</sup> Restu Rahayu, Rita Rosita, Yayu Sri Rahayuningsih, Asep Herry Hernawan, Prihantini Prihantini, "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Penggerak", *Jurnal Basicedu*, vol. 6, no. 4 2022, hal. 6313-6319.

<sup>12</sup> Dewi Rahmadayanti, Agung Hartoyo, "Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar", *Jurnal Basicedu*, vol. 6, no. 4 2022, hal. 7174-7187.

pengimplementasiannya kurikulum merdeka belajar. Pertama, guru berperan sebagai penggerak komunitas, kedua guru sebagai agen perubahan, ketiga guru pencipta wadah diskusi dan kolaborasi, keempat guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kelima guru wajib mengembangkan diri lewat seminar, keenam guru menjadi motivator dalam kelas.<sup>13</sup>

Peran penting perkembangan kurikulum dalam suatu lembaga dan seorang guru yang harus memiliki kemampuan menyampaikan pembelajaran agar suatu kurikulum terwujud. Guru harus mampu mengetahui perkembangan teknologi, guru harus mampu mengimplementasikan kurikulum yang selalu berubah, guru harus membuat skala prioritas pekerjaan yang harus segera diselesaikan.<sup>14</sup> Pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka membuat guru lebih professional melalui berbagai macam pembinaan dan pelatihan. Kepala sekolah melaksanakan peranannya menjadi mediator dan motivator keikutsertaan guru dalam pelatihan kurikulum. Kepala sekolah juga berperan sebagai partisipator dalam rapat atau diskusi secara rutin. Kepala sekolah juga sebagai supervisor dan evaluator dalam implementasi kurikulum merdeka. Faktor yang dihadapi kepala sekolah adalah kurang lancarnya jaringan internet sebagai sarana untuk kelancaran guru menggunakan teknologi dalam pembelajaran.<sup>15</sup> Pada kurikulum merdeka mengajar

---

<sup>13</sup> Putri Jannati, Faisal Arief Ramadhan, Muhamad Agung Rohimawan, “Peran Guru Penggerak Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, vol. 7, no. 1 Januari 2023, hal. 330-345.

<sup>14</sup> Divana Leli Anggraini, Marsela Yulianti, Siti Nurfaizah, Anjani Putri Belawati Pandiangan, “Peran Guru Dalam Mengembangkan Kurikulum Merdeka”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, vol. 1, no. 3 Oktober 22, Hal. 290-298.

<sup>15</sup> Isa Isa, Muhammad Asrori, Rini Muharini, “Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar”, *Jurnal Basicedu*, vol. 6, no. 6 November 2022, hal. 9947-9957.

ditonjolkan sikap proaktif menghadapi perubahan secara progresif dan transformatif. Ini dapat dilihat dari arah pengembangan pembelajaran yang secara positif dapat memulihkan produktifitas dalam aktivitas belajar mengajar. Melalui proses pembelajaran yang berorientasi pada proyek, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih luwes, aktif dan adaptif. Pendidik diberikan keleluasaan untuk menerapkan metode pembelajaran yang dipandang tepat bagi peserta didik sehingga pelaksanaan aktivitas belajar mengajar dapat berjalan dengan menyenangkan, lebih mendalam dan merdeka.<sup>16</sup>

Pada kurikulum merdeka perlu langkah-langkah untuk mempercepat perkembangan kurikulum merdeka yang diimplementasikan dalam satuan pendidikan dimana guru mampu memerankan diri sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar dan mengutamakan pembelajaran berbasis proyek. Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kesinambungan antara kurikulum KKNI dan Kurikulum Merdeka serta terdapat kesamaan dan kecocokan sesuai dengan prinsip pada Teknologi pendidikan. Sehingga pada implementasi Kurikulum Merdeka, semua ini pada dasarnya adalah berorientasi pada peningkatan kompetensi peserta didik beserta segala sistem pendukung yang mengarah demi terwujudnya kualitas lulusan yang berkualitas.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Dewa Ayu Made Manu Okta Priantini, Ni Ketut Suarni, I Ketut Suar Adnyana, “Analisis Kurikulum Merdeka Dan Platform Merdeka Belajar Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas”, *Jurnal Penjaminan Mutu*, vol. 8, no. 2 Agustus 2022, Hal. 238-244.

<sup>17</sup> Mulik Cholilah, Anggi Gratia Putri Tatuwo, Komariah, Shinta Prima Rosdiana, Achmad Noor Fatirul, “Pengembangan Kurikulum Merdeka Dalam Satuan Pendidikan Serta Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Abad 21”, *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, vol. 1, no. 2 Mei 2023, Hal. 56-67.

Konsep kurikulum merdeka memungkinkan guru dan siswa memilih dan mengembangkan isi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Konsep ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memperhatikan keunikan dan kebutuhan lingkungan belajar masing-masing. Pelaksanaan pembelajaran kurikulum mandiri menekankan pada pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penerapan kurikulum mandiri diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, karena kurikulum ini didasarkan pada kebutuhan dan minat siswa. Kurikulum Merdeka diharapkan dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan bagi siswa, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kurikulum Merdeka juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran dan membantu peserta didik mempersiapkan diri menghadapi tantangan hidup di masa depan.<sup>18</sup>

Pada jenjang SD, penelitian yang dilakukan Jannah et al., menyoroti problematika penerapan kurikulum merdeka di SD Muhammadiyah Manyar Gresik dan SD Islam Al Amin Probolinggo menunjukkan bahwa guru dituntut lebih kreatif dalam menyusun modul ajar, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Selain itu, pembelajaran perlu dilaksanakan di luar kelas untuk meningkatkan keaktifan dan inovasi siswa.<sup>19</sup> Selanjutnya di SMA Negeri Sekota Padangsidimpuan menunjukkan bahwa penerapan kurikulum merdeka telah berjalan sesuai aturan Kemendikbud, meskipun belum mencapai tingkat sempurna,

---

<sup>18</sup> Siti Wahyuni, “Kurikulum Merdeka Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran”, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4, No. 6 Desember 2022, Hal. 13404-13408.

<sup>19</sup> Faridahtul Jannah, Thooriq Irtifa’ Fathuddin, dan Putri Fatimatus Az Zahra, “Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar 2022”, *Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan*, vol. 4, no. 2 (2022), hal. 63.

guru memiliki kebebasan dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai kebutuhan lokal, dan asesmen kompetensi minimum telah dilakukan.<sup>20</sup> Lebih lanjut implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri Kota Makassar menunjukkan bahwa pendekatan seperti Discovery Learning, Inquiry Learning, dan Problem-Based Learning mendukung terciptanya iklim belajar yang efektif dimana penelitian ini menekankan pentingnya integrasi strategi pembelajaran dalam penguatan kurikulum.<sup>21</sup> Sedangkan di SMP Negeri 1 Jumo Temanggung menemukan bahwa perencanaan dilakukan secara kolektif melalui musyawarah guru dan disesuaikan dengan karakteristik lokal. Evaluasi rutin oleh kepala sekolah memastikan pelaksanaan pembelajaran sesuai tujuan.<sup>22</sup>

Pada konteks pandemi COVID-19, pembelajaran daring menjadi tantangan utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka di perguruan tinggi.<sup>23</sup> Penelitian Manalu et al., menyoroti peran pembelajaran luar kelas dalam membangun karakter siswa, seperti keberanian, hubungan sosial, dan kreativitas dimana guru didorong untuk memberikan ide pembelajaran inovatif guna mendukung pengembangan siswa secara holistik.<sup>24</sup> Selain itu, guru juga diharapkan memiliki kompetensi dalam perencanaan, manajemen, evaluasi, dan penelitian untuk memastikan

---

<sup>20</sup> Hasrida Hutabarat, Rahmatika Elindra, Muhammad Syahril Harahap, "Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Di Sma Negeri Sekota Padangsidimpuan", *Jurnal MathEdu (Mathematic Education Journal)*, vol. 5, no. 3 (2022): hal. 58.

<sup>21</sup> A. Erni Ratna Dewi, "Implementasi Strategi Penguatan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah", *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling*, vol. 5. no. 1 (2022), hal. 81.

<sup>22</sup> Siti Malikah, Winarti, Fitri Ayuningssih, Muh Rifki Nugroho, Sumardi, Budi Murtiyasa, "Manajemen Pembelajaran Matematika pada Kurikulum Merdeka", *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 4, no. 4 (2022) hal. 5916-5926.

<sup>23</sup> Hasim, Evi. "Penerapan kurikulum merdeka belajar perguruan tinggi di masa pandemi covid-19", *Prosiding Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*, (2020), hal. 68.

<sup>24</sup> Juliati Boang Manalu, Pernando Sitohang, Netty Heriwati Henrika Turnip, "Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar", *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar* vol. 1, no. 1 (2022), hal. 85.

kurikulum memenuhi kebutuhan siswa.<sup>25</sup> Pada penerapan kurikulum merdeka belajar, efektivitas pembelajaran sangat berpengaruh terhadap capaian pendidikan. Implementasi kurikulum merdeka memerlukan manajemen yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan.<sup>26</sup>

Dalam persiapan implementasi kurikulum merdeka, guru perlu mempelajari lebih jauh mengenai kurikulum merdeka, mempertimbangkan projek sesuai fase siswa agar tercapai capaian pembelajaran yang bermakna, mendalam, dan menyenangkan serta pelajar Pancasila yang berkompeten.<sup>27</sup> Lebih lanjut implementasi kurikulum merdeka juga menemui banyak tantangan dalam pengaplikasiannya. Implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar mengalami berbagai problematika, salah satunya ialah kurangnya tingkat pemahaman guru dalam menyusun RPP merdeka belajar. Selain itu, kurangnya inovasi guru dalam mengajar juga menjadi hambatan tersendiri dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar.<sup>28</sup>

Selain itu masih ada beberapa tantangan lain yaitu 1) keterampilan mengajar, 2) pandai dalam menguasai keterampilan dasar untuk kebutuhan belajar di era digital, 3) pandai mengelola kelas agar siswa tidak bosan, dan 4) memiliki

---

<sup>25</sup> Difana Leli Anggraini, Marsela Yulianti, Siti Nur Faizah, Anjani Putri Belawati Pandiangan, “Peran Guru Dalam Mengembangkan Kurikulum Merdeka”, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial (JIPSI)* vol. 1, no. 3 (2022): hal. 297.

<sup>26</sup> Muhammad Reza Arviansyah, Ageng Shagena, “Efektivitas Dan Peran Dari Guru Dalam Kurikulum Merdeka Belajar”, *LENTERA Jurnal Ilmiah Kependidikan*, vol. 17, no. 1 (2022), hal. 48.

<sup>27</sup> Dewi Rahmadayanti, Agung Hartoyo, “Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar”, *Jurnal Basicedu*, vol. 6, no. 4 Juni 2022, hal. 7174-7187.

<sup>28</sup> Mei Nur Rusmiati, Riswati Ashifa, Yusuf Tri Herlambang, “Analisis Problematisika Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar”, *Jurnal Kajian Penelitian dan Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 7, no. 2 April 2023, hal. 1490-1499.

referensi yang banyak dan luas, sedangkan hambatannya berupa 1) kurangnya pengalaman tentang kurikulum merdeka, 2) kurangnya fasilitas yang memadai, dan 3) kurangnya jam pelajaran karena terfokus pada proyek. Keberhasilan dalam penerapan kurikulum merdeka di SMP Muhammadiyah 19 Sawangan dapat tercapai apabila kepala sekolah dan guru mampu mengatasi tantangan serta hambatan yang ada. Kepala sekolah sebagai pemimpin harus membimbing guru untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran sehingga penerapan kurikulum merdeka dapat dilaksanakan secara optimal.<sup>29</sup> Meski demikian program merdeka belajar adalah salah satu langkah pertama untuk mulai mengubah pendidikan Indonesia dengan proses kreativitas dan inovasi di setiap sekolah, karena di dunia saat ini dan di masa depan, keseragaman bukanlah sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, oleh karena itu perlu untuk menciptakan terobosan baru yang dapat membuat pendidikan di Indonesia kreatif, inovatif dan kolaboratif.<sup>30</sup>

Penelitian yang telah diuraikan diatas cenderung memisahkan fokus pada aspek-aspek tertentu, yaitu penerapan kurikulum merdeka belajar, bagaimana kurikulum ini diimplementasikan di berbagai konteks pendidikan dimana penelitian ini biasanya mencakup strategi, teknik pembelajaran, serta dukungan infrastruktur. Kemudian permasalahan dalam kurikulum merdeka belajar dimana penelitian ini

---

<sup>29</sup> Amelia Dwi Damayanti, Azka Nidaul Jannah, Neli Agustin, “Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Smp Muhammadiyah 19 Sawangan”, Prosiding Samasta, Vol. 1, No. 1 2022, Hal. 41-48.

<sup>30</sup> Vira Rizki Amalia, Masduki Asbari, “Merdeka Belajar: Solusi Awal Transformasi Pendidikan Indonesia?”, *Journal Of Information And Systems And Management*, vol. 2, no. 5 Oktober 2023, hal. 62-67.

menyoroti hambatan yang muncul, seperti kurangnya pelatihan guru, keterbatasan sumber daya, atau resistensi dari berbagai pemangku kepentingan. Terakhir menyangkut penyelesaian masalah dalam kurikulum merdeka belajar yang berfokus pada solusi untuk permasalahan yang dihadapi, mencakup pelatihan, perbaikan kebijakan, atau pengadaan sumber daya. Fokus penelitian yang terfragmentasi ini menunjukkan bahwa setiap penelitian berusaha mendalamai salah satu aspek untuk mendapatkan pemahaman yang lebih spesifik. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan karena kurang menggambarkan hubungan antara aspek-aspek tersebut. Penulis menegaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda, dengan menggabungkan tiga aspek utama (penerapan, permasalahan, dan penyelesaian) dalam satu kajian. Pendekatan ini menawarkan kelebihan, yaitu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang Kurikulum Merdeka Belajar.

Penelitian ini berpotensi memberikan pandangan holistik yang dapat digunakan oleh pemangku kebijakan, guru, dan pihak lain untuk memahami dan meningkatkan pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Dengan mengintegrasikan tiga aspek tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi hubungan kausal antara penerapan, hambatan, dan solusi. Dengan menyatukan tiga aspek, penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi referensi penting dalam pengembangan Kurikulum Merdeka. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, merancang pelatihan guru yang lebih terarah, dan Meningkatkan kualitas implementasi kurikulum di berbagai jenjang pendidikan. Pendekatan komprehensif yang diusulkan sangat relevan mengingat kompleksitas

Kurikulum Merdeka yang memerlukan kolaborasi banyak pihak. Penelitian seperti ini juga dapat berfungsi sebagai model bagi kajian lainnya untuk mengeksplorasi pendekatan serupa dalam konteks yang berbeda. Dalam analisis lebih lanjut, penting untuk mempertimbangkan konteks kurikulum merdeka di Indonesia, termasuk kebijakan pendidikan nasional, tingkat kesiapan guru dan siswa dalam menerapkan kurikulum, dan dukungan pemerintah dan pihak swasta dalam menyediakan sumber daya. Keberhasilan penelitian ini sangat bergantung pada pemahaman mendalam terhadap konteks di mana Kurikulum Merdeka diterapkan. Penelitian yang menyatukan tiga aspek ini juga dapat membantu mengidentifikasi apakah kebijakan kurikulum ini telah mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan pendidikan yang lebih fleksibel dan relevan bagi siswa. Dengan mengintegrasikan aspek penerapan, permasalahan, dan penyelesaian, penelitian yang direncanakan dapat memberikan kontribusi yang bernilai tinggi bagi pengembangan kurikulum di Indonesia.

## E. Kerangka Teori

### 1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses membuat keputusan yang bijak. Keputusan pengadilan, perintah eksekutif, undang-undang, atau dekret presiden biasanya termasuk dalam kategori ini. Menurut Grindle implementasi kebijakan adalah kegiatan yang bisa dievaluasi di agenda tertentu. Sebelum proses implementasi bisa dilaksanakan, tujuan serta sasaran harus ditetapkan, rencana

kegiatan harus dibuat, dan dana harus dialokasikan untuk mencapainya.<sup>31</sup> Van Meter dan Van Horn berpendapat, implementasi kebijakan adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi demi meraih sasaran yang sudah ditentukan.<sup>32</sup>

Kebijakan utamanya diaplikasikan kebanyakan berbentuk undang-undang, tetapi juga bisa berupa arahan atau keputusan badan peradilan. Dalam kebanyakan kasus, keputusan itu menentukan masalah yang harus diselesaikan, menetapkan tujuan yang jelas, dan menetapkan langkah-langkah melaksanakan proses tersebut. Proses implementasi dimulai dengan pengesahan undang-undang, dan diikuti dengan pelaksanaan keputusan oleh lembaga atau lembaga yang terkait.<sup>33</sup>

Tahap implementasi dalam siklus proses kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sering kali ditentukan oleh efektivitas tahap implementasi ini. Sebab, tanpa pelaksanaan yang tepat, kebijakan tersebut tidak akan mencapai tujuan yang telah direncanakan<sup>34</sup>.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan berkaitan dengan pencapaian tujuan kebijakan melalui hasil kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Tugas implementasi adalah membangun koneksi yang memfasilitasi pencapaian tujuan kebijakan publik terwujud dengan upaya institusi pemerintah yang mengikutkan bermacam-macam pihak yang terkait.<sup>35</sup>.

---

<sup>31</sup> Merilee Grindle, “*Politics and Policy Implementation in The Third World*”, (New Jersey: Princeton University Press, 1980), hlm 7

<sup>32</sup> Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana” *Jurnal Administrasi Publik* Vol 1 No. 1 (2010)

<sup>33</sup> Joko Pramono, “*Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*”, (Surakarta: UNISRI Press, 2020), hlm 38-39

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana” *Jurnal Administrasi Publik* Vol 1 No. 1 (2010)

Implementasi kebijakan diperlukan karena, menurut pandangan para ahli, tiap kebijakan yang sudah disusun mesti diwujudkan dalam tindakan nyata. Karenanya, implementasi kebijakan dianggap penting untuk bermacam-macam pandangan. Pelaksanaan kebijakan adalah salah satu tahap krusial dalam proses kebijakan publik. Tahap ini sangat krusial karena, meskipun suatu kebijakan dirancang sangat baik jika tidak dilaksanakan dengan efektif, tujuan kebijakan tidak akan terwujud.. Untuk menganalisa dan memahami pelaksanaan kebijakan, diperlukan kerangka konseptual. Model-model implementasi sering digunakan sebagai perangkat efektif dalam melakukan analisis terhadap kebijakan tersebut.<sup>36</sup>. Menurut pandangan George Edward III tentang masalah kebijakan, implementasi kebijakan dibutuhkan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah kebijakan yang ada.<sup>37</sup>

Beberapa tahap dalam proses pembuatan kebijakan meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, serta penilaian dan evaluasi. Secara lebih mendalam, evaluasi memberikan informasi mengenai manfaat atau nilai yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Hasil kebijakan bernilai karena mereka membantu mencapai tujuan. Oleh karena itu, bisa dibilang program atau kebijakan tersebut sudah cukup signifikan, yang

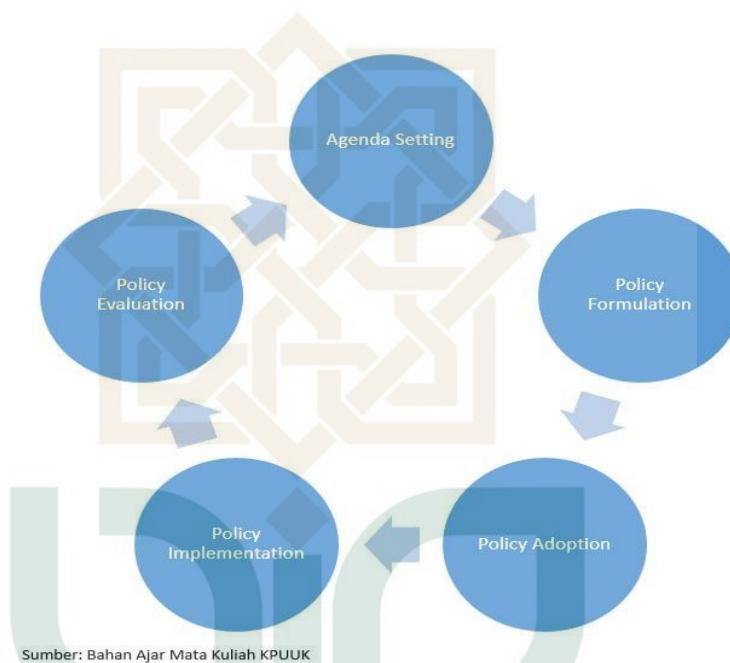
---

<sup>36</sup> Tuah Orbita Sandyasmoro, "Hubungan Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai dengan Fraud dan Kinerja Bendahara (Perspektif Bendahara Pengeluaran di Pemerintah Kabupaten Magetan) *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* Vol. 7 No. 2 (2021)

<sup>37</sup> George C. Edward III, "Public Policy Implementing", (London-England: Jai Press Inc, 1984)

menunjukkan bahwa masalah kebijakan telah diselesaikan.<sup>38</sup> Diagram proses pembuatan kebijakan dapat dilihat dibawah ini:

**Gambar 1. 2 Alur Perumusan dalam Kebijakan Publik**



Dalam menganalisis implementasi kurikulum merdeka belajar di sekolah-sekolah negeri Kecamata Baraka, terdapat beberapa konsep yang menjadi dasar penilaian dalam melihat proses implementasi kebijakan tersebut. Indikator-indikator ini akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. untuk melihat kinerja daripada implementasi kebijakan yang sedang dijalankan, yaitu:

---

<sup>38</sup> William N. Dunn, “*Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*”, (Pittsburgh: Prentice-Hall, 1994), 608

### a. Komunikasi

George Edward III mengemukakan bahwa komunikasi adalah "proses transfer informasi dari pihak yang menyampaikan pesan kepada pihak yang menerima pesan." Ia juga menyatakan informasi mengenai kebijakan publik mesti tersampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Perihal ini berarti supaya para pelaksana kebijakan bisa menguasai yang butuh dipersiapkan serta dicoba untuk melaksanakan kebijakan, sehingga tujuan serta sasaran kebijakan bisa berbanding lurus dengan harapan. Edward III menjelaskan, ada tiga dimensi komunikasi kebijakan yaitu transmisi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency)<sup>39</sup>.

- a) Dimensi transmisi (*transmission*) menekankan bahwa kebijakan publik wajib diinformasikan tidak cuma kepada implementor, namun pula kepada kumpulan sasaran kebijakan serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- b) Dimensi kejelasan atau *clarity*, menekankan bahwa kebijakan perlu diberitahukan kepada pelaku kebijakan, komunitas yang dituju, serta entitas yang terkait dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami maksud, tujuan, dan isi kebijakan sehingga mereka tahu apa yang

---

<sup>39</sup> Chabib Wijaya dan Hendra Adi Putra, "Implementasi Program Pagu Wilayah Kecamatan (PWK) Bidang Ekonomi". Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta, (2012)

perlu dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif dan efisien.

- c) Dimensi konsistensi (*consistency*) penting supaya kebijakan yang ditetapkan tidak menyebabkan kerancuan bagi pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak-pihak yang terlibat bisa menjalankan kebijakan tanpa kebingungan akibat informasi yang simpang siur<sup>40</sup>.

### **b. Faktor Eksternal**

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, yang dikenal dengan "A Model of the Policy Implementation" (1975), menggambarkan implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal. Proses ini melibatkan interaksi antara berbagai variabel yang saling mempengaruhi. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier, dimulai dari pengambilan keputusan politik, diikuti oleh pelaksana, dan berakhir pada kinerja kebijakan publik. Model ini juga menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling terkait, seperti faktor sosial, politik, dan ekonomi, dan yang harus diperhatikan dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, seberapa besar kontribusi lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan sangat penting. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung dapat menyebabkan masalah yang berujung pada kegagalan implementasi

---

<sup>40</sup> *Ibid*

kebijakan. Maka dari hal itu, untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, diperlukan kondisi lingkungan eksternal yang mendukung.<sup>41</sup>

### c. Tipe Kebijakan

Daniel Mazmania dan Paul A. Sabatier menciptakan model ini untuk mengenali variabel yang berpotensi berpengaruh dalam pencapaian tujuan. selama proses implementasi merupakan komponen penting dalam menganalisis implementasi kebijakan.<sup>42</sup> Ada jenis masalah yang akan diselesaikan dan dikendalikan. Jenis kebijakan ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu masalah sederhana melibatkan satu atau beberapa pengambil keputusan dan sekumpulan kecil alternatif kebijakan. Kemudian masalah agak sederhana melibatkan satu atau beberapa pengambil keputusan dan sejumlah kecil alternatif kebijakan dan masalah yang rumit yang melibatkan banyak pengambil keputusan yang nilainya tidak diketahui atau tidak dapat diprediksi. Penting bagi pemangku kebijakan untuk bisa mengelompokkan tipe masalah dan mengendalikan permasalahan yang terjadi agar tidak memperparah keadaan.<sup>43</sup>

Dalam proses implementasi kebijakan, terdapat sejumlah faktor yang dapat menjadi tantangan, salah satunya adalah kesukaran-

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Agus Subianto, “*Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*” (Surabaya:PT. Menuju Insan Cemerlang, 2020), 46

<sup>43</sup> William N. Dunn, “*Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*”, (Pittsburgh: Prentice-Hall, 1994)

kesukaran teknis yang sering kali muncul ketika mencoba menerapkan kebijakan dalam situasi yang kompleks. Kesulitan ini bisa berasal dari keterbatasan sumber daya, teknologi, atau infrastruktur yang tidak memadai. Selain itu, keragaman perilaku di masyarakat yang harus diatur juga menjadi tantangan tersendiri. Setiap kelompok masyarakat memiliki karakteristik, kebiasaan, dan nilai yang berbeda, sehingga tidak mudah untuk merancang aturan yang efektif untuk semua kelompok tersebut.

Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada jumlah total penduduk yang termasuk dalam pihak sasaran. Jika hanya sebagian kecil dari populasi yang menjadi target, maka dampak kebijakan mungkin terbatas, namun jika cakupannya luas, tantangannya juga akan semakin besar. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki dari kebijakan tersebut juga penting untuk diperhitungkan. Semakin signifikan perubahan yang diharapkan, semakin besar pula upaya yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dipahami dan diikuti oleh masyarakat. Dalam hal ini, kombinasi antara pendekatan teknis dan pemahaman sosial sangat dibutuhkan agar kebijakan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.

#### d. Mekanisme Paksaan

Definisi implementasi teori dan kerangka berpikir Grindle, serta model konseptual dan kerangka berpikir untuk implementasi sebagai proses administratif dan politik. Kerangka kerja ini didasarkan pada jawaban atas dua pertanyaan utama, terutama yang berkaitan dengan

negara-negara berkembang. Pertanyaan pertama terkait dengan konten program. Isi program dapat memengaruhi proses implementasi. Program tertentu mungkin memiliki proses implementasi yang lebih kompleks secara intrinsik. Pertanyaan kedua berkaitan dengan kondisi lingkungan yang berhubungan atau mempengaruhi implementasi.<sup>44</sup>. Kepatuhan dan respons dari kelompok sasaran serta pelaksana kebijakan dianggap sebagai faktor penting dalam menjalankan suatu kebijakan.

Hal lain yang mendasari pentingnya implementasi kebijakan bisa dipahami dari pandangan Grindle dan Quade yang menekankan pentingnya sinergi antara tiga variabel utama, yaitu kebijakan, organisasi, dan lingkungan. Mereka berharap bahwa dengan memilih kebijakan yang tepat, masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal untuk mencapai tujuan. Setelah kebijakan ditentukan, organisasi pelaksana harus mendukungnya dengan kewenangan dan sumber daya yang tersedia. Selain itu, kondisi lingkungan kebijakan perlu diciptakan karena lingkungan ini bisa mempengaruhi kesuksesan kebijakan, baik secara positif maupun negatif. Jika lingkungan mendukung kebijakan, maka implementasi akan berjalan lancar, namun jika tidak, hal itu bisa menghambat keberhasilan. Yang juga tak kalah penting adalah

---

<sup>44</sup> Agus Subianto, “*Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*” (Surabaya:PT. Menuju Insan Cemerlang, 2020), 46

kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan, yang menjadi faktor utama dalam menentukan dampak kebijakan terhadap masyarakat<sup>45</sup>.

#### e. Partisipasi Publik (*Bottom Up*)

Pendekatan implementasi *Bottom Up* muncul sebagai tanggapan terhadap kritik terhadap pendekatan rasional (*top down*). Parsons menyatakan bahwa hubungan antara pembuat dan pelaksana kebijakan adalah elemen kunci dalam implementasi. Model *Bottom Up* memandang implementasi sebagai proses negosiasi dan konsensus. Menurut Parsons, pendekatan ini menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam penerapan kebijakan di lapangan, memungkinkan pelaksana menyesuaikan kebijakan dengan kondisi nyata.

Adam Smith, seorang ahli kebijakan yang menekankan pendekatan *bottom-up*, yang melihat implementasi kebijakan sebagai serangkaian proses. Model yang dia buat melihat implementasi kebijakan dari sudut pandang perubahan sosial dan politik, yang berarti bahwa kebijakan pemerintah berusaha menjadikan perbaikan atau perubahan masyarakat sebagai sasaran utama. Ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Smith, yaitu:

- 1) *Idealized policy* merujuk pada bentuk hubungan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk menggerakkan, memengaruhi, dan memotivasi kelompok sasaran agar melaksanakan kebijakan tersebut.

---

<sup>45</sup> Rasya Anisa Kusuma, “Implementasi Perda No 18 Tahun 2017 Tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Garut”. Skripsi. Universitas Siliwangi, 2023

- 2) *Target groups* adalah kelompok dalam pemangku kepentingan kebijakan yang diharapkan untuk mengadopsi pola interaksi sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dikarenakan mereka merupakan tujuan dari implementasi kebijakan, diharapkan mereka bisa menyesuaikan tindakan mereka dengan kebijakan yang ditetapkan.
- 3) *Implementing organization* adalah lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan.
- 4) *Environmental factors* adalah elemen-elemen dalam lingkungan yang memengaruhi implementasi kebijakan, seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Setelah dilakukan implementasi pada kebijakan yang dibuat atau dilakukan, maka langkah selanjutnya dalam rumusan yaitu evaluasi kebijakan. Evaluasi dapat dianggap setara dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), yaitu istilah-istilah yang menggambarkan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam bentuk nilai tertentu. Tentunya dalam mengevaluasi kebijakan, terdapat beberapa proses yang lebih dahulu dilakukan untuk dapat mengevaluasi dengan baik, karena satu tahap dengan tahap yang lain saling berhubungan. Yang mana, dalam pengaplikasiannya dapat membawa pengetahuan yang sesuai untuk membuat keputusan yang relevan dalam kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini juga dapat

mempengaruhi hipotesa, langkah serta keputusan dalam setahap yang secara tak langsung pula berpengaruh pada tiap rangkaianya<sup>46</sup>.

Evaluasi mempunya sejumlah kegunaan utama dalam menganalisis kebijakan, antara lain:

**1) Memberikan Informasi Kinerja Kebijakan**

Evaluasi menyediakan data yang akurat dan dapat diandalkan tentang seberapa baik kebijakan telah memenuhi kebutuhan, nilai, dan peluang yang ditargetkan. Proses ini menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui tindakan pemerintah.

**2) Memperjelas dan Mengkritisi Nilai-Nilai Dasar**

Evaluasi membantu menjelaskan nilai yang mengawali penetapan sasaran dan tujuan untuk mendefinisikan serta mengoperasionalkannya. Selain itu, evaluasi juga memungkinkan kritik terhadap nilai-nilai tersebut dengan menilai relevansi tujuan dan sasaran dalam konteks masalah yang ingin diatasi. Hal ini memungkinkan analisis terhadap berbagai alternatif nilai dan dasar rasionalitas, seperti teknis, ekonomis, hukum, sosial, dan substantif.<sup>47</sup>

**3) Mendukung Metode Analisis Kebijakan Lainnya**

Perumusan masalah dan rekomendasi adalah metode analisis kebijakan lainnya yang dibantu oleh evaluasi. Evaluasi dapat

---

<sup>46</sup>William N. Dunn, “*Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*”, (Pittsburgh: Prentice-Hall, 1994), 608

<sup>47</sup>*Ibid*, 609-611

digunakan untuk merumuskan kembali masalah kebijakan dengan informasi tentang kinerja kebijakan yang kurang memadai. Ini karena evaluasi menunjukkan bahwa pilihan yang dianggap terbaik sebelumnya harus diganti dengan pilihan yang lebih efektif.<sup>48</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.<sup>49</sup> Dengan penggunaan metode ini akan membantu penulis mengidentifikasi atau menyelidiki masalah yang bersifat alami serta hubungan atau pola yang terbentuk di dalamnya. Selain itu, subjek penelitian dibahas secara mendalam dalam penelitian kualitatif ini. Sebagai langkah awal, teknisnya penulis melakukan tahapan wawancara kepada beberapa informan guna mendapatkan informasi dan data langsung yang terkait dengan penerapan Kurikulum Merdeka di tiga level pendidikan (SD, SMP, SMA) di Kecamatan Baraka.

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Baraka, adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Guru-guru di tiga level pendidikan. Sebagai penunjang kelengkapan data penelitian, penulis juga melakukan wawancara ke instansi-instansi yang terkait langsung dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Enrekang, yaitu Dinas pendidikan Kabupaten Enrekang. Waktu dan pengumpulan data penelitian akan dilakukan pada bulan juni sampai bulan Agustus.

---

<sup>48</sup>*Ibid*, 609-611

<sup>49</sup> Yaitu metode yang mengkaji status kelompok manusia, suatu benda, sekumpulan kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa kelas pada saat ini. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat uraian.

## 1. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>50</sup> Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan proses wawancara dengan kepala dinas, kepala sekolah serta beberapa guru, terkait upaya sekolah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam penerapan Kurikulum Merdeka Belajar. Sedangkan, objek penelitian dalam pengumpulan data terkait penerapan Kurikulum Merdeka Belajar, penulis melakukan sesi wawancara kepada empat instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang, SD 20 Baraka, SMPN 1 Baraka, SMAN 5 Enrekang.

Dalam proses pengumpulan data, teknisnya peneliti melakukan izin mempublish dan mewawancarai, diantaranya:

- a. Jumurdin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.
- b. Muhammad Alwi, Kepala Sekolah SD Negeri 20 Baraka.
- c. M. Nur, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Baraka.
- d. Muhammad Abdul Gani, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Enrekang.
- e. Hasruddin Djuhani, Komite Sekolah SMPN 1 Baraka

## 2. Metode Pengumpulan Data

Pertama, observasi, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik, perilaku, atau sifat-sifat objek dan subjek penelitian, penulis meninjau langsung tempat lokasi penelitian dan mengamati

---

<sup>50</sup> Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari pihak lain atau lewat dokumen, lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 137.

penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah yang sudah masuk dalam daftar objek penelitian penulis. Selain itu, juga ikut serta menyaksikan secara langsung proses kegiatan ajar mengajar di ketiga level sekolah (SD, SMP, dan SMA) di lingkup Kecamatan Baraka

Kedua, wawancara, digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari responden atau peserta penelitian, target data yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan ini adalah keterbukaan pihak sekolah maupun para guru dalam menyikapi penerapan Kurikulum Merdeka. Penulis melakukan wawancara di lapangan dengan beberapa responden mulai dari Kepala Sekolah di 3 tingkatan sekolah yakni (SDN 20 Baraka, SMPN 1 Baraka, dan SMAN 5 Enrekang), kemudian juga komite sekolah sebagai perwakilan dari orang tua siswa, serta yang terakhir melakukan wawancara di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang dalam hal ini Sekretaris Disdikbud Kabupaten Enrekang.

Ketiga, dokumentasi, berfungsi untuk menyimpan semua informasi yang terkait dengan penelitian, dokumentasi ini berupa tulisan, rekaman dan pengambilan gambar dengan subjek-subjek penelitian. Penulis mengumpulkan data hasil wawancara melalui rekaman di smartphone dan juga melakukan sesi dokumentasi atau pengambilan gambar responden dan juga peneliti sebagai bukti pelaksanaan penelitian di lapangan.

### **3. Analisis Data**

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan

kepada orang lain atau dengan bahasa lain proses mencari dan menyusun data dari catatan lapangan, hasil wawancara, dan sumber lainnya sehingga datanya mudah dipahami dan temuannya dapat dikomunikasikan. Dalam menjawab rumusan masalah metode analisis yang digunakan penulis adalah metode menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau melakukan verifikasi guna membuat kesimpulan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Diorientasikan untuk memetakan dan mempermudah pembahasan penelitian yang dilakukan. Sistematika penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan pembahasan yang termuat ke dalam beberapa sub-sub pembahasan, diantaranya, penjelasan komprehensif terkait Gambar umum tempat penelitian, dan kondisi internal lokasi penelitian.

Bab ketiga, membahas mengenai implementasi, permasalahan, dan upaya yang dilakukan pemerintah dan sekolah dalam merespon permasalahan di penerapan kurikulum merdeka belajar.

Bab keempat memuat analisis dari penerapan kurikulum merdeka belajar di sekolah-sekolah negeri Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dengan menggunakan lima model dalam teori implementasi kebijakan yaitu pola komunikasi, faktor eksternal, tipe kebijakan, mekanisme paksaan, dan partisipasi publik.

Bab kelima diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan bab terakhir menyajikan tanggapan atas rumusan masalah, dan ruang saran diberikan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil analisis penulis terkait penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi dalam penerapan kurikulum merdeka belajar di sekolah-sekolah negeri Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dimulai dengan penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang menyesuaikan kurikulum nasional dengan kebutuhan spesifik sekolah, dilanjutkan dengan pembuatan modul pengajaran untuk membantu guru merancang pembelajaran, serta pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler sesuai struktur kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui penilaian sekolah, promosi kelas, dan kelulusan, yang bertujuan untuk memastikan pencapaian kompetensi siswa, efektivitas pembelajaran, dan pengembangan mutu pendidikan.

Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar menghadapi berbagai permasalahan di semua tingkatan pendidikan, mulai dari kementerian hingga siswa sebagai objek akhir penerapan kurikulum. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, termasuk tenaga pendidik, fasilitas, materi ajar, serta dukungan teknis dan finansial, yang terutama dirasakan di daerah dengan akses pendidikan yang terbatas. Selain itu, kesiapan guru menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kurikulum, namun tingkat kesiapan ini sering bervariasi tergantung pada pengalaman, pelatihan, dan dukungan yang diterima. Kurangnya dukungan dan koordinasi efektif di tingkat sekolah juga menjadi hambatan, terutama akibat keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Tantangan lain adalah integrasi

kearifan lokal dalam kurikulum, yang penting untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi siswa. Di sisi lain, penguasaan teknologi informasi yang rendah di kalangan guru menghambat pembelajaran yang seharusnya lebih dinamis dan inovatif. Beban tugas guru yang berat, mencakup administrasi dan pelatihan, semakin menambah tekanan dalam penerapan kurikulum baru. Terakhir, kurangnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi siswa di rumah mengurangi efektivitas pembelajaran, karena siswa kehilangan dukungan yang esensial untuk keberhasilan akademik dan pengembangan karakter mereka.

Untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan Kurikulum Merdeka Belajar, pemerintah dan sekolah di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, mengadakan berbagai program pelatihan bagi guru. Bimbingan teknis (bimtek) bertujuan meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan kepercayaan diri guru melalui pelatihan terstruktur yang berkelanjutan. Selain itu, In House Training (IHT) memberikan pelatihan praktis dan relevan dengan kebutuhan lokal, mendukung kolaborasi antarpendidik, serta memfasilitasi implementasi kurikulum secara lebih optimal. Workshop juga diadakan dengan pendekatan interaktif untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan guru dalam menjalankan kurikulum. Program-program ini menjadi langkah strategis yang efektif dalam mendukung keberhasilan Kurikulum Merdeka di wilayah tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, terdapat beberapa saran yang diberikan oleh penulis untuk meningkatkan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk penyediaan sumber daya pendidikan yang lebih memadai, terutama untuk sekolah di daerah yang memiliki keterbatasan akses. Selain itu, pelatihan guru seperti bimbingan teknis, In House Training (IHT), dan workshop perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan dan kontekstual sesuai kebutuhan lokal, termasuk penguasaan teknologi informasi serta integrasi kearifan lokal ke dalam kurikulum. Koordinasi di tingkat sekolah juga perlu ditingkatkan, dengan memastikan dukungan penuh dari kepala sekolah dan staf untuk mendukung kolaborasi yang lebih baik di antara pendidik. Beban administrasi guru dapat dikurangi melalui digitalisasi proses administratif, sehingga guru dapat lebih fokus pada pembelajaran. Lebih lanjut, pelibatan orang tua perlu dioptimalkan melalui program sosialisasi dan kegiatan yang mendorong mereka untuk aktif mendampingi siswa di rumah.

Penting juga untuk mengadakan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kurikulum ini. Proses ini harus mencakup pengumpulan data dan umpan balik dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, dan orang tua, guna memastikan bahwa setiap tantangan dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi mutu pendidikan di wilayah terpencil.

## Daftar Pustaka

- Anugrah Dwi. (2023). “Pendidikan Formal dan Contohnya”, <https://fkip.umsu.ac.id/pendidikan-formal-dan-contohnya>, diakses pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 10.27.
- Kembali Baca. (2024). “Regulasi Baru Kurikulum Merdeka, Mendikbud Cabut 18 Peraturan Lama”, <https://bacakembali.com/2024/04/08/regulasi-baru-kurikulum-merdeka-mendikbud-cabut-18-peraturan-lama/>, diakses tanggal 24 Juni 2024 pukul 10.53.
- Dewi, Z. & Sunarni. (2023). “Peran Literasi Digital Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka: Adaptasi Dan Transformasi Di Era Digital”. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, Vol. 4, No.1.
- Direktorat Sekolah Dasar. (2022). “Kurikulum Merdeka”, <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/kurikulum-merdeka>, diakses tanggal 27 Maret 2024 pukul 11.02.
- Sibagariang dkk. (2021). “Peran Guru Penggerak Dalam Pendidikan Merdeka Belajar di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Pendidikan*, Vol. 14, No. 2.
- Gerakan Dairi Merdeka Belajar. (2022). “Implementasi Kurikulum Merdeka”, <https://merdekabelajar.dairikab.go.id/tentang-kurikulum-merdeka-dan-platform-merdeka-mengajar/>, diakses tanggal 27 Maret 2024 pukul 11.24.
- Qurniawati, D.R. (2023). “Efektivitas Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar”, *Proceeding Umsurabaya*.

- Sabriadi, H.R. & Wakia, N. (2021). “Problematika implementasi kurikulum merdeka belajar di perguruan tinggi”, *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 2.
- Putri dkk. (2023). “Revolusi Pendidikan: Kurikulum Merdeka Solusi Problematika Belajar?”, *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, Vol. 2, No. 6.
- Selamat, A. (2023). “Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Covid”, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2.
- Rahayu dkk. (2022). “Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Penggerak”, *Jurnal Basicedu*, Vol. 6, No. 4.
- Rahmadayanti, D. & Hartoyo, A. (2022). “Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar”, *Jurnal Basicedu*, Vol. 6, No. 4.
- Jannati dkk. (2023). “Peran Guru Penggerak Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, Vol. 7, No. 1.
- Anggraini dkk. (2022). “Peran Guru Dalam Mengembangkan Kurikulum Merdeka”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, Vol. 1, No. 3.
- Isa dkk. (2022). “Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar”, *Jurnal Basicedu*, Vol. 6, No. 6.
- Priantini dkk. (2022). “Analisis Kurikulum Merdeka Dan Platform Merdeka Belajar Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas”, *Jurnal Penjaminan Mutu*, Vol. 8, No. 2.

- Cholilah dkk. (2023). “Pengembangan Kurikulum Merdeka Dalam Satuan Pendidikan Serta Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Abad 21”, *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol. 1, No. 2.
- Wahyuni, S. (2022). “Kurikulum Merdeka Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran”, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4, No. 6.
- Jannah dkk. (2022). “Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar 2022”, *Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 2.
- Hutabarat dkk. (2022). “Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Di SMA Negeri Sekota Padangsidimpuan”, *Jurnal MathEdu (Mathematic Education Journal)*, Vol. 5, No. 3.
- Dewi, E.R. (2022). “Implementasi Strategi Penguatan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah”, *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling*, Vol. 5, No. 1.
- Malikah dkk. (2022). “Manajemen Pembelajaran Matematika pada Kurikulum Merdeka”, *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No. 4.
- Hasim. & Evi. (2020). “Penerapan kurikulum merdeka belajar perguruan tinggi di masa pandemi covid-19”, *Prosiding Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*.
- Manalu dkk. (2022). “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar”, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, Vol. 1, No. 1.
- Anggraini dkk. (2022). “Peran Guru Dalam Mengembangkan Kurikulum Merdeka”, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial (JIPSI)*, Vol. 1, No. 3.

- Arviansyah, M.R. & Shagena, A. (2022). “Efektivitas Dan Peran Dari Guru Dalam Kurikulum Merdeka Belajar”, *LENTERA Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 17, No. 1.
- Rahmadayanti, D. & Hartoyo, A. (2022). “Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar”, *Jurnal Basicedu*, Vol. 6, No. 4.
- Nusmiati dkk. (2023). “Analisis Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar”, *Jurnal Kajian Penelitian dan Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 7, No. 2.
- Damayanti dkk. (2022). “Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Smp Muhammadiyah 19 Sawangan”, *Prosiding Samasta*, Vol. 1, No. 1.
- Amalia, V.R & Asbari, M. (2023). “Merdeka Belajar: Solusi Awal Transformasi Pendidikan Indonesia?”, *Journal Of Information And Systems And Management*, Vol. 2, No. 5.
- Yaitu metode yang mengkaji status kelompok manusia, suatu benda, sekumpulan kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa kelas pada saat ini. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat uraian.
- Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari pihak lain atau lewat dokumen, lihat Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Muis. (2018). Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. (Skripsi, Unismuh: Makassar).

Sukmawati. (2023). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Batita Di Puskesmas Baraka Kabupaten Enrekang Tahun 2023. (Tesis, UMI: Makassar).

Akbar dkk. (2024). “Strategi Pengembangan Potensi Desa Berbasis Indeks Desa Membangun Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”, *Teknosains: Media Informasi Dan Teknologi*, Vol. 18, No. 1.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Pokok SD Negeri 20 Baraka, dalam <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/A13DEF033BD776A9B89B>, diakses tanggal 7 Desember 2024.

Ibid.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Pokok SMP Negeri 1 Baraka, dalam <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/A13DEF033BD776A9B89B>, diakses tanggal 7 Desember 2024.

Ibid.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Pokok SD Negeri 20 Baraka, dalam <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/A13DEF033BD776A9B89B>, diakses tanggal 7 Desember 2024.

Ibid.

Enrekangkab.go.id, Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang, dalam [https://disdikbud.enrekangkab.go.id/?page\\_id=4](https://disdikbud.enrekangkab.go.id/?page_id=4), diakses tanggal 7 Desember 2024.

Enrekangkab.go.id, Visi dan Misi Kabupaten Enrekang, dalam <https://enrekangkab.go.id/selayang-pandang/visi-dan-misi/>, diakses tanggal 7 Desember 2024.

Ibid.

Database Peraturan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/281064/> perbup-kab-enrekang-no-65-ta hun-2023, diakses tanggal 7 Desember 2024.

Harahap dkk. (2024). “Analisis Penerapan Pembelajaran Kurikulum K13 dan Kurikulum Merdeka: Literatur Review”, *Jurnal Seminar Nasional LPPM Ummat*, Vol. 3.

Nazar dkk. (2024). “Peluang dan Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar: Sebuah Studi Interview di Sekolah Penggerak dan Mandiri Berubah”, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 11, No. 1.

Muhammad Abdul Gani. “Kurikulum Merdeka Belajar”. Hasil Wawancara Pribadi: 14 Agustus 2024, SMAN 5 Enrekang.

Alip Siti Malita. (2023). “Berbagi Praktik Baik: Penyusunan KOSP”, <https://bgpsulawesiutara.kemdikbud.go.id/2023/05/10/berbagi-praktik-baik-penyusunan-kosp/>, diakses tanggal 29 November 2024 Pukul 11.50.

Badruddin. (2024). Profil Pelajar Pancasila, dalam <https://www.mtsn3-bogor.sch.id/read/96/profil-pelajar-pancasila>, diakses tanggal 29 November 2024 Pukul 12.14.

Herliani, H. & Heryati, E. (2022) “Pembelajaran 7. Pengembangan Potensi Peserta Didik”, *Modul Belajar Mandiri*.

- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pentingnya Penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, dalam <https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/pentingnya-penyusunan-kurikulum-operasional-satuan-pendidikan>, diakses tanggal 29 November 2024.
- Firmansyah dkk. (2023). “Fleksibilitas Kurikulum Merdeka Belajar dalam Mempersiapkan Peserta Didikmenjadi Komunitas Masyarakat Sains dan Digital”, *National Multidisciplinary Sciences*, Vol. 2, No. 6.
- Muhammad Alwi. “Kurikulum Merdeka Belajar”. Hasil Wawancara Pribadi: 17 Agustus 2024, SDN 20 Baraka.
- Nengsih dkk. (2024). “Pengalaman Modul Ajar Kurikulum Merdeka”, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*, Vol. 8, No. 1.
- Wilman Juniardi. (2023). “Modul Ajar: Komponen, Kriteria, Cara Menyusun, dan Contoh”, <https://www.quipper.com/id/blog/info-guru/modul-ajar/>, diakses tanggal 1 Desember 2024 Pukul 12.31.
- Syulbi. (2023). “Menuju Kemandirian Siswa Melalui Kurikulum Merdeka: Studi Kasus Tentang Proses Internalisasi Nilai-Nilai Kemandirian Dalam Pembelajaran”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Hendry dkk. (2024). “Pengaruh Implementasi Kurikulum Merdeka Terhadap Hasil Belajar Dan Kemandirian Siswa Sd Negeri Gandasuli 01 Brebes”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 9, No. 2.
- Nengsih dkk. (2024). “Pengalaman Modul Ajar Kurikulum Merdeka”, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*, Vol. 8, No. 1.

- Muhammad Abdul Gani. “Kurikulum Merdeka Belajar”. Hasil Wawancara Pribadi: 14 Agustus 2024, SMAN 5 Enrekang.
- Kurniawan dkk. (2024). “Relevansi Dan Peran Kurikulum Merdeka Dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Krisis Global Warming”, *Indonesian Journal Of Environment And Disaster (IJED)*, Vol. 3, No. 1.
- Nurhayani. (2023). “Peran Teknologi Digital dalam Mewujudkan Merdeka Belajar: Tantangan dan Peluang Bagi Pendidikan Masa Depan”, *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, Vol. 3, No. 3.
- Efendi dkk. (2023). “Relevansi Kurikulum Merdeka Dengan Konsepsi Ki Hadjar Dewantara: Studi Kritis Dalam Perspektif Filosofis-Pedagogis”, *Jurnal Elementaria Edukasia*, Vol. 6, No. 2.
- Masrik, H. (2019). “Penggunaan Metode Diskusi Kelompok Guna Meningkatkan Hasil Belajar Materi Menemukan Ide Bacaan Teks Di Smp”, *Jurnal Kajian Pembelajaran dan Keilmuan*, Vol. 3, No. 2.
- Shofia, H & Rosalina, A. (2024). “Evaluasi Kurikulum Merdeka Menggunakan Model Cipp Pada Sekolah Dasar”, *Jurnal Cendekia Pendidikan*, Vol. 3, No. 1.
- Muhammad Nur. “Kurikulum Merdeka Belajar”. Hasil Wawancara Pribadi: 23 Agustus 2024, SMPN 1 Baraka.
- Patandean Julius Roma. (2023), “Melihat Praktik Baik Kurikulum Merdeka dari Pelosok Kabupaten Enrekang”, <https://www.kompasiana.com/owenjuve/6519977b08a8b54a666916e2/merdeka-belajar-dari-pelosok-enrekang>, diakses tanggal 15 Desember 2024 Pukul 12.44.

- Fitriyanti Sulaiman. "Kurikulum Merdeka Belajar". Hasil Wawancara Pribadi: 21 Agustus 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.
- Telkom University. (2024). "Jaringan Komputer: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Manfaatnya", <https://dif.telkomuniversity.ac.id/en/jaringan-komputer-pengertian-fungsi-jenis-dan-manfaatnya/>, diakses tanggal 3 Desember 2024 Pukul 12.56.
- Mahmudah, M. (2022). "Korelasi Media Dan Sumber Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka", *Journal of Islamic Religious Instruction*, Vol.6, No. 2.
- Hilmin dkk. (2022). "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka", *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 2.
- Sandrawati, I. F. (2016). "Pengaruh Lingkungan Sosial Siswa Dan Kondisi Ekonomi Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di Smp Negeri 9 Kota Probolinggo", *Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS*, Vol. 10, No. 2.
- Muhammad Alwi. "Kurikulum Merdeka Belajar". Hasil Wawancara Pribadi: 17 Agustus 2024, SDN 20 Baraka.
- Sugianto. (2022). "Pembelajaran Berdiferensiasi: Antara Manfaat dan Tantangan" ya, <https://bgpsumsel.kemdikbud.go.id/pembelajaran-berdiferensiasi-antara-manfaat-dan-tantangannya/>, diakses tanggal 3 Desember 2024 Pukul 13.01.
- Kasmawati. (2021). "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan Dan Pengalaman Mengajar Terhadap Profesionalisme Guru Smp Negeri Di Kabupaten Bone", *Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 6, No. 1.

- Hasruddin Djuhani. “Kurikulum Merdeka Belajar”. Hasil Wawancara Pribadi: 26 Agustus 2024, Komite Sekolah SMPN 1 Baraka.
- Widyatna, H. (2023). “Analisis Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Praktik Baik Kurikulum Merdeka”, *Jurnal National Conference for Ummah*, Vol. 1, No. 1.
- Siregar dkk. (2024). “Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah MIN 12 Medan”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 2, No. 8.
- Muhammad Nur. “Kurikulum Merdeka Belajar”. Hasil Wawancara Pribadi: 23 Agustus 2024, SMPN 1 Baraka.
- Arrohmah, (2023). “Kurikulum Merdeka Belajar: Pengertian, Tujuan, dan Latar belakang”, <https://arrohmah.co.id/kurikulum-merdeka-belajar-pengertian-tujuan-latar-belakang/>, diakses tanggal 4 Desember 2024 Pukul 13.33.
- ESQ Business School, (2023). “Apa itu Kurikulum Merdeka? Begini Konsep dan Tujuannya!”, <https://esqbs.ac.id/apa-itu-kurikulum-merdeka-begini-konsep-dan-tujuannya/>, diakses tanggal 4 Desember 2024 Pukul 13.45.
- Arifin dkk. (2022). “Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan (Kajian Pada Sekolah Menengah: SMPN 1 Malang, SMPN 10 Malang, SMP Plus Al Kautsar)”, *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 2.
- Viola dkk. 2024. “Analisis Kurikulum Berbasis Masyarakat : Memanfaatkan Kurikulum Muatan Lokal Untuk Pendidikan yang Konteks tual”, *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 12, No. 1.
- Muhammad Alwi. “Kurikulum Merdeka Belajar”. Hasil Wawancara Pribadi: 17 Agustus 2024, SDN 20 Baraka.

- Sitompul, B. (2022). "Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Di Era Digital", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 3.
- Mahie dkk. (2018). "Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Guru Matematika Tingkat SMA Di Kabupaten Enrekang", *Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 2.
- Muhammad Nur. "Kurikulum Merdeka Belajar". Hasil Wawancara Pribadi: 23 Agustus 2024, SMPN 1 Baraka.
- Fitria, A.S. & Limgiani. (2024). "Pengaruh Beban Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru (Literature Review)", *Journal of Student Research (JSR)*, Vol. 2, No. 4.
- Ma'wa dkk. (2024). "Pengaruh Self-Efficacy Guru, Beban Kerja, dan Stres Kerja terhadap Profesionalitas Guru TK di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut", *Journal of Education Research*, Vol.5, No. 2.
- Sawal dkk. (2022). "Pengaruh Beban Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Stres Kerja Guru Di SMAN 12 Enrekang", *Educational Journal: General and Specific Research*, Vol. 2, No. 2.
- Hasruddin Djuhani. "Kurikulum Merdeka Belajar". Hasil Wawancara Pribadi: 26 Agustus 2024, Komite Sekolah SMPN 1 Baraka.
- Kadir, G. (2023). "Model Partisipasi Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Pai Pada Peserta Didik Di Sdn Kecil Rante Padang Kabupaten Enrekang", *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Vol. 10, No. 1.
- Febriansyah. (2018). Potensi Pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Enrekang 2012 – 2016. (Skripsi, Unismuh: Makassar).

- Acoci dkk. (2023). “Pengaruh Pendidikan Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Pada Siswa Sekolah Dasar”, *Taksonomi Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 3, No. 1.
- Patandean Julius Roma. (2023). “Melihat Praktik Baik Kurikulum Merdeka dari Pelosok Kabupaten Enrekang”, <https://www.kompasiana.com/owenjuve/6519977b08a8b54a666916e2/merdeka-belajar-dari-pelosok-enrekang>, di akses tanggal 15 Desember 2024 Pukul 14.20.
- Deswita dkk. (2023). “Bimbingan Teknis Kurikulum Merdeka Belajar Bagi Guru Di Ra Al Kautsar”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.2, No. 2.
- Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, (2022). “Implementasi Kurikulum Merdeka”, <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/program-prioritas/implementasi-kurikulum-merdeka>, diakses tanggal 15 Desember 2024 Pukul 14.59.
- Nisa, A.W. & Andaryani, E.T. (2023). “Peran Dan Manfaat Kurikulum Merdeka Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Jenjang Sekolah Dasar”, *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa*, Vol. 1, No. 4.
- Taufik dkk. (2023). “Analisis Kesulitan Guru dalam Menyusun Modul Ajar Berbasis Kurikulum Merdeka Belajar”, *Jurnal Pendidikan dan Media pembelajaran*, Vol. 2, No. 3.
- Muhammad Abdul Gani. “Kurikulum Merdeka Belajar”. Hasil Wawancara Pribadi: 14 Agustus 2024, SMAN 5 Enrekang.
- Pendidikan Dunia. (2023). “Bimtek IKM SMAN 5 Enrekang Hadirkan Kepala Cabang Dinas Wilayah X, dalam <https://duniapendidikan.id/daerah/15/07/>

2022/bimtek-ikm-sman-5-enrekang-hadirkan-kepala-cabang-dinas-wilaya  
h-x/, diakses tanggal 15 Desember 2024 Pukul 15.22.

Muhammad Abdul Gani. “Kurikulum Merdeka Belajar”. Hasil Wawancara Pribadi:  
14 Agustus 2024, SMAN 5 Enrekang.

Muhammad Nur. “Kurikulum Merdeka Belajar”. Hasil Wawancara Pribadi: 23  
Agustus 2024, SMPN 1 Baraka.

Malabali. (2023). “Panduan In House Training (IHT) Tahun 2023 Implementasi  
Kurikulum Merdeka Bagi Satuan Pendidikan”, [https://fredimala bali.com/berita/detail/panduan-in-house-training-iht-tahun-2023-implementasi-kuri](https://fredimala bali.com/berita/detail/panduan-in-house-training-iht-tahun-2023-implementasi-kurikulum-merdeka-bagi-satuan-pendidikan)  
kulumbagisatuansatuanpendidikan

, diakses tanggal 15 desember 2024  
Pukul 15.48.

Irvani dkk. (2022). “In House Training (IHT) Implementasi Kurikulum Merdeka di  
Komite Pembelajaran sebagai Komunitas Praktisi Sekolah Penggerak”,  
*Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1.

Partner Accelerate Learning. (2022). “In House Training Solusi Tepat Meningkatka  
Kinerja Tim”, <https://alpconsulting.co.id/in-house-training-adalah/>, diakses  
tanggal 15 Desember 2024 Pukul 16.26.

Muhammad Nur. “Kurikulum Merdeka Belajar”. Hasil Wawancara Pribadi: 23  
Agustus 2024, SMPN 1 Baraka.

Hasruddin Djuhani. “Kurikulum Merdeka Belajar”. Hasil Wawancara Pribadi: 26  
Agustus 2024, Komite Sekolah SMPN 1 Baraka.

RI Kemendikbud. (2023). “Sukseskan Implementasi Kurikulum Merdeka,  
Kemendikbudristek Gelar Workshop Pendidikan”, <https://itjen.kemdikbud>.

go.id/web/sukseskan-implementasi-kurikulum-merdeka-kemendikbudris te  
k-gelar-workshop-pendidikan/, diakses tanggal 15 Desember 2024 Pukul  
13.40.

Publik Teropong. (2024). “Workshop Pendidikan untuk Mempersiapkan SDM  
Unggul Indonesia Emas 2045”, [https://www.teropongpublik.co.id/  
workshop-pendidikan-untuk-mempersiapkan-sdm-unggul-indonesia-emas-  
2045](https://www.teropongpublik.co.id/workshop-pendidikan-untuk-mempersiapkan-sdm-unggul-indonesia-emas-2045), diakses tanggal 15 Desember 2024 Pukul 13.59.

Arjasa SDN 4. (2023). “Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka”, [https://  
sdn4arjasa.sch.id/blog/workshop-implementasi-kurikulum-merdeka](https://sdn4arjasa.sch.id/blog/workshop-implementasi-kurikulum-merdeka), diaks  
es tanggal 15 Desember 2024 Puklul 14.22.

Muhammad Alwi. “Kurikulum Merdeka Belajar”. Hasil Wawancara Pribadi: 17  
Agustus 2024, SDN 20 Baraka.

Ibid.

Fakta Maspul. (2024). “Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Enrekang Buka  
Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka”, [https://maspulfakta.com/  
2024/07/10/kadis-pendidikan-dan-kebudayaan-enrekang-buka-workshop-  
implementasi-kurikulum-merdeka/](https://maspulfakta.com/2024/07/10/kadis-pendidikan-dan-kebudayaan-enrekang-buka-workshop-implementasi-kurikulum-merdeka/), diakses tanggal 15 Desember 2024  
Pukul 15.12.